PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 5 TAHUN 2025

Peraturan ini telah resmi berlaku dan menjadi pedoman dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Perhubungan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Menteri Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 5 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada tanggal 26 Februari 2025.

Aturan ini menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung kebijakan nasional JDIH yang terbuka, terstandar, dan terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dibawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Permenhub ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Nomor KM 3 Tahun 2000, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan organisasi Kementerian Perhubungan.

Permenhub ini merupakan payung hukum dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, mendukung keterbukaan informasi publik, reformasi birokrasi dan pengambilan kebijakan di Kementerian Perhubungan.

POKOK-POKOK PENGATURAN DALAM PERMENHUB NOMOR PM 5 TAHUN 2025

1. **Penguatan struktur organisasi JDIH Kementerian**
   Penetapan pengelola JDIH dengan struktur yang jelas dan sumber daya yang memadai menjadi hal penting. Seperti diketahui, organisasi JDIH Kementerian terdiri dari Pusat JDIH dan anggota JDIH, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan.
2. **Standarisasi pengelolaan dokumen hukum**
   Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum meliputi proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum dilakukan secara terstandar sesuai pedoman nasional dan ketentuan teknis JDIHN.
3. **Pemanfaatan teknologi digital**
   Selain arsip manual, pengelolaan informasi hukum kini dilakukan melalui aplikasi JDIH Kemenhub untuk memperluas akses publik dan meningkatkan efisiensi layanan hukum secara digital.
4. **Penyediaan layanan informasi yang responsif**
   JDIH Kemenhub ditujukan menjadi pusat layanan informasi hukum yang responsif, terpercaya, dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan tugas kementerian.